

Standar jaminan sosial ILO

Kroum Markov (markov@ilo.org)

ILO

Garis besar presentasi

- 1. ILO, Standar-standarnya dan penerapannya**
- 2. Hak asasi manusia pada jaminan sosial dalam hukum internasional**
- 3. Mandat ILO dalam jaminan sosial dan fungsi penetapan standarnya**
- 4. Standar jaminan sosial ILO: basis normatif strategi ILO untuk perluasan jaminan sosial**
- 5. Peran apa yang dapat dimainkan oleh standar jaminan sosial internasional?**



1. ILO, Standar-standarnya dan penerapannya



Standar Ketenagakerjaan Internasional (SKI)

Konvensi

- ✓ perjanjian internasional
- ✓ begitu diratifikasi, ia menjadi mengikat secara hukum
- ✓ bahkan bila tidak diratifikasi sekalipun, ia menjadi tujuan untuk dicapai, dan berdampak pada undang-undang nasional
- ✓ teknis atau promotif
- ✓ 189 konvensi

Rekomendasi

- ✓ tidak terbuka untuk ratifikasi (bisa mengharuskan pelaporan)
- ✓ tidak mengikat dan biasanya menyertai Konvensi
- ✓ memberikan prinsip pemandu, umum atau teknis, yang harus diterapkan di tingkat nasional
- ✓ 204 rekomendasi

Bagaimana cara kita memastikan bahwa standar jaminan sosial internasional diterapkan secara efektif???



SISTEM PENGAWASAN SKI OLEH ILO

Sistem pengawasan reguler

✓ Sebuah negara yang telah meratifikasi sebuah Konvensi ILO wajib melaporkan secara Reguler tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk menerapkannya sesuai Pasal 22 Konstitusi

✓ Berdasarkan Pasal 19 Konstitusi, Negara anggota wajib melaporkan secara berkala, tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk memberlakukan tiap ketentuan standar ILO (bahkan Konvensi yang tidak diratifikasi)

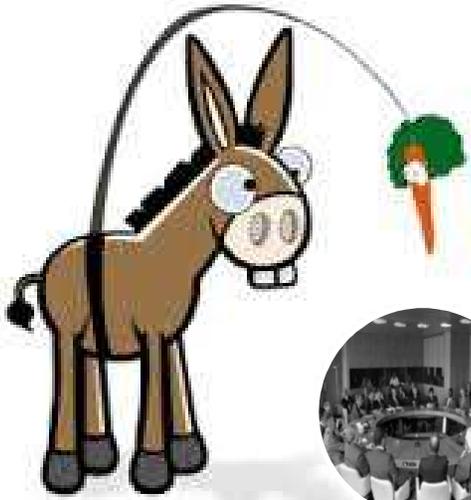
Prosedur khusus

✓ Hak untuk menghadirkan suatu tindakan khusus terhadap sebuah Negara anggota



**Dan apa yang terjadi bila Negara gtidak
memenuhi kewajibannya?**





Mekanisme pengawasan & Asistensi teknis



Konferensi Ketenagakerjaan Internasional
Komite Konferensi Penerapan Konvensi dan
Rekomendasi



Digunakan oleh berbagai mekanisme
pemantauan hak asasi manusia PBB



Digunakan oleh Negara-negara untuk
menjatuhkan sanksi



2. Hak asasi manusia pada jaminan sosial dalam hukum internasional



Hak Asasi Manusia Universal





Jaminan Sosial – sebuah Hak Asasi

Instrumen internasional:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)



Pasal 22: “Setiap orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak atas jaminan sosial”



Jaminan Sosial – hak yang ditegakkan dengan cara perjanjian internasional

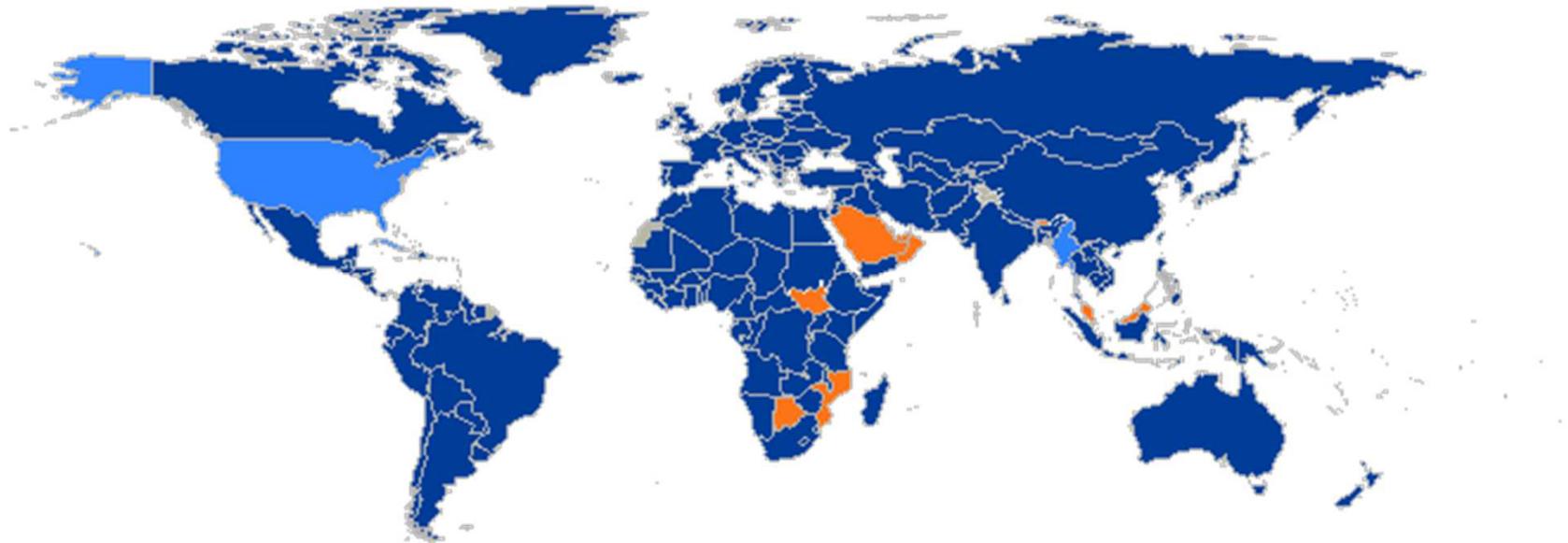


**International Covenant on
Economic Social and Cultural Rights**

Pasal 9: “Negara Pihak untuk Perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial”



Jaminan Sosial – hak yang ditegakkan dengan cara perjanjian internasional



164 Negara anggota PBB
berkomitmen untuk menjamin hak
atas jaminan sosial bagi setiap
orang



Jaminan Sosial – sebuah Hak Asasi Manusia

Instrumen internasional lain:

- *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979*
- *Konvensi Hak Anak, 1989*
- *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, 1965*
- *Konvensi internasional Hak Semua Pekerja Migran dan keluarganya, 1990*
- *Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, 2006*
- *Konvensi terkait Status Pengungsi, 1951 dan Konvensi terkait status orang tak bernegara, 1954*



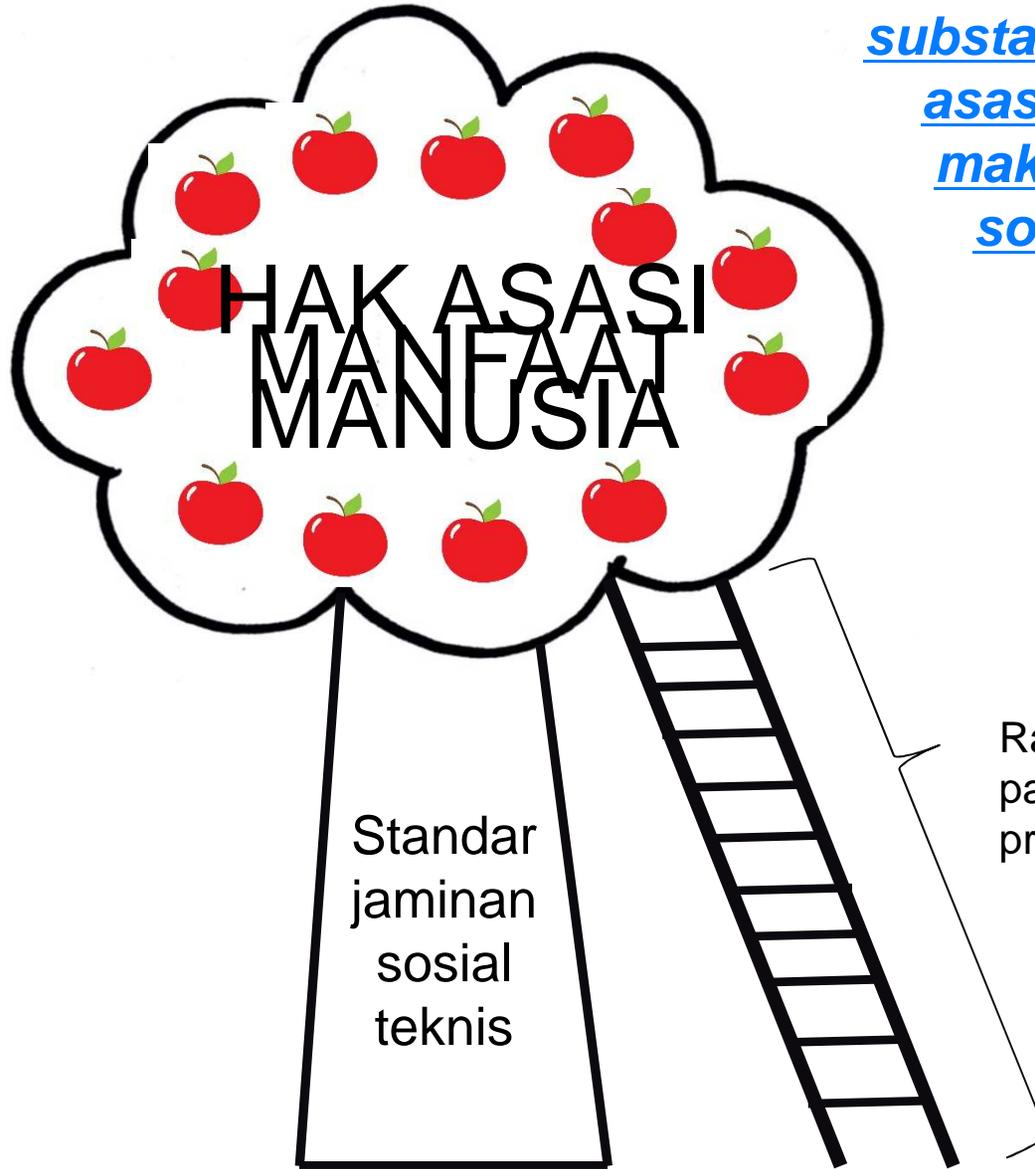
Perjanjian Regional

- **Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Orang, 1981**
- **Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia, 2004**
- **Deklarasi Manusia Hak dan Kewajiban Orang, 1948**
- **Protokol Tambahan Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia di Bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1988**
- **Piagam Sosial Eropa, 1961**
- **Piagam Hak Asasi Uni Eropa, 2000**
- **Persemakmuran Negara-negara Merdeka – Konvensi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar, 1995**



3. Mandat ILO di bidang jaminan sosial dan fungsi normatif di bidang jaminan sosial

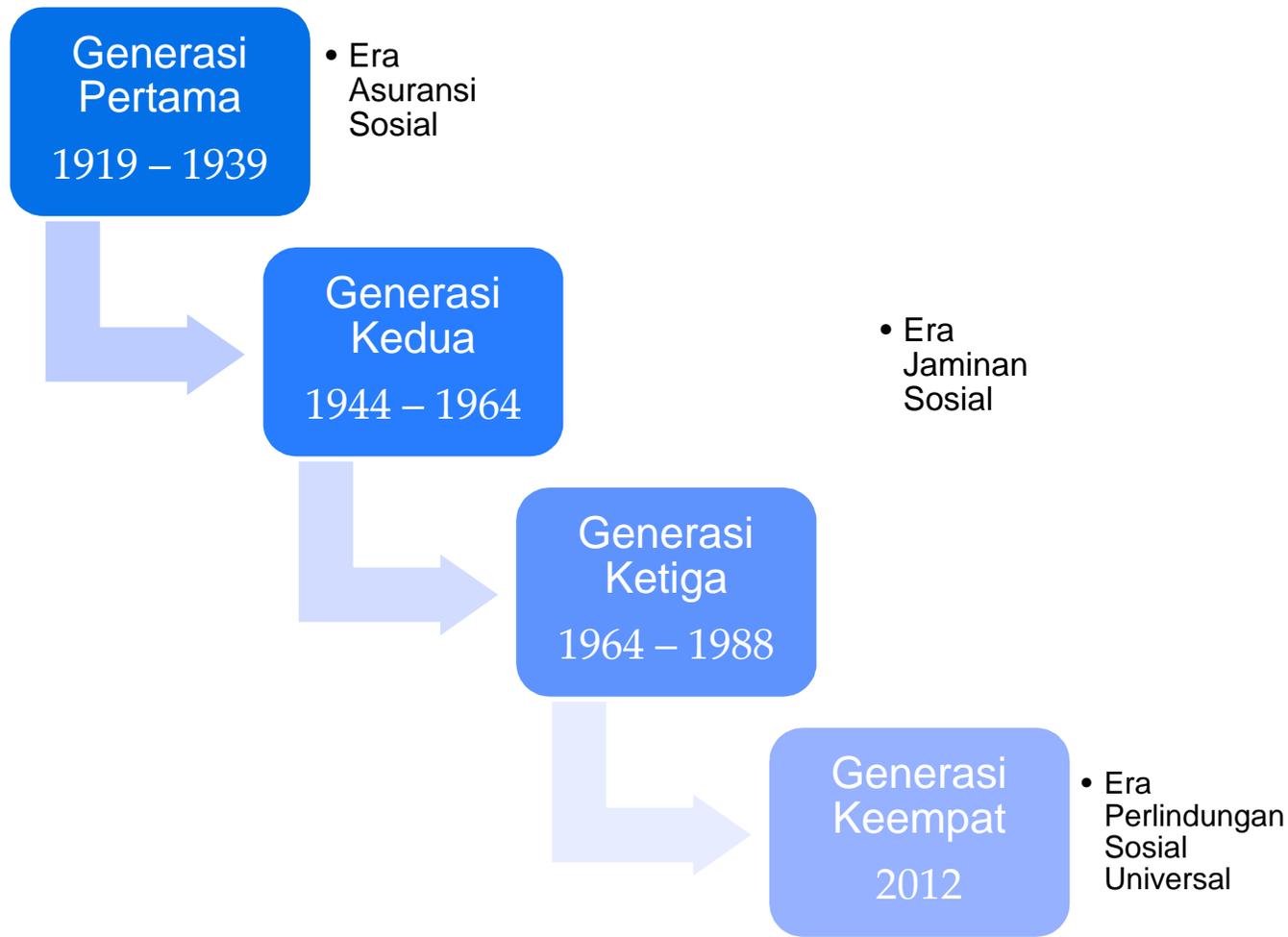




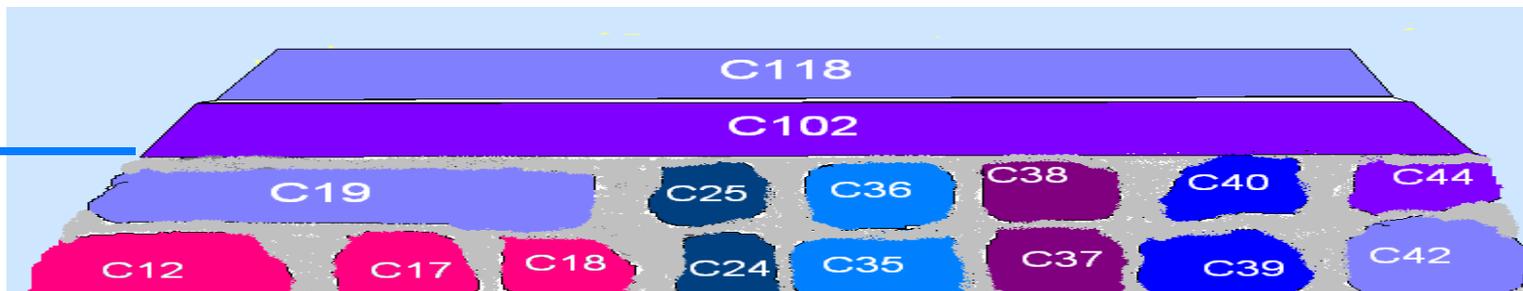
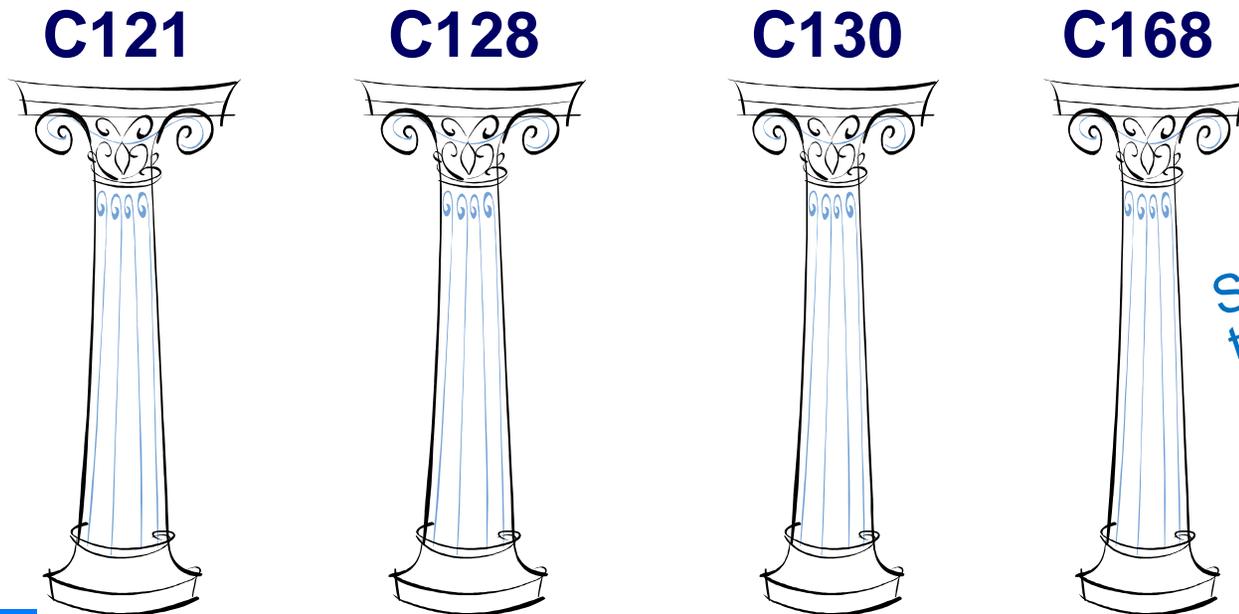
Memberikan
substansi pada hak
asasi manusia,
maka jaminan
sosial juga



Hampir 100 tahun kegiatan penetapan standar: 31 Konvensi dan 25 Rekomendasi



Tiga generasi standar



Prinsip-prinsip utama yang dibangun oleh hukum internasional

Prinsip-prinsip Internaional Pemandu

Tanggung-Jawab Negara
Menyeluruh dan Primer

Universalitas

Kecukupan

Keberlanjutan

Diversity of methods and approaches

Hak atas
manfaat oleh
hukum

Prediktabilitas

Manajemen
yang
transparan dan
akuntabel

Koordinasi lintas kebijakan dan instansi publik

Solidaritas
melalui
pembiayaan
bersama

Inklusi sosial

Partisipasi
inklusif

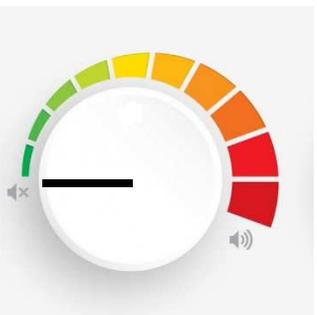
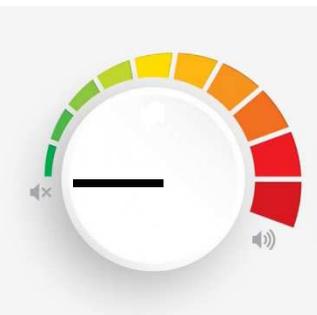
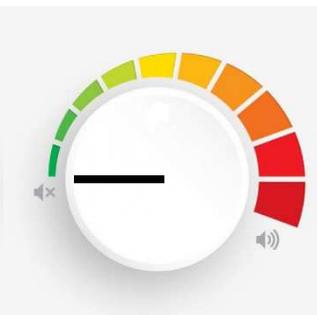
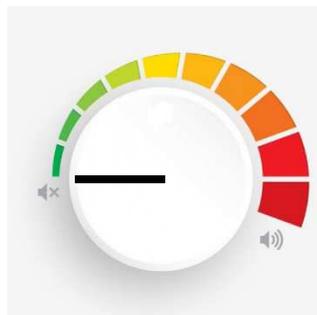
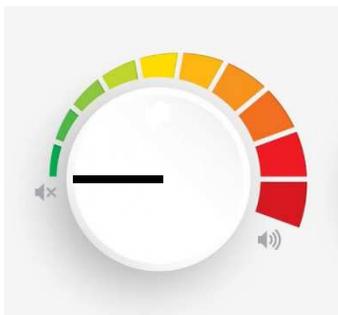
Realisasi bertahap

SIAPA?

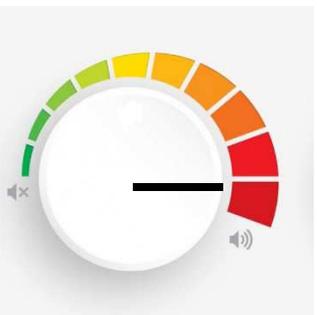
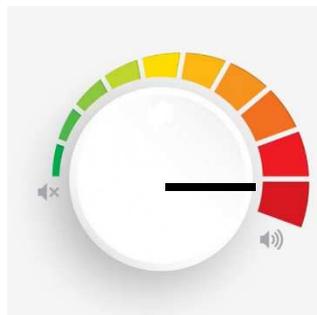
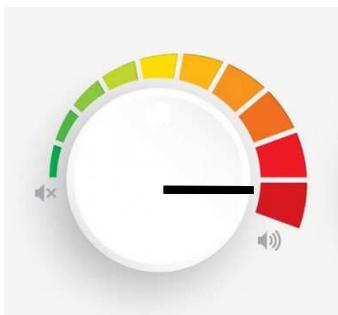
MENGAPA?

KAPAN? BERAPA LAMA? BERAPA BANYAK

K102



**Standar
lebih
tinggi**



REALISASI NYATA

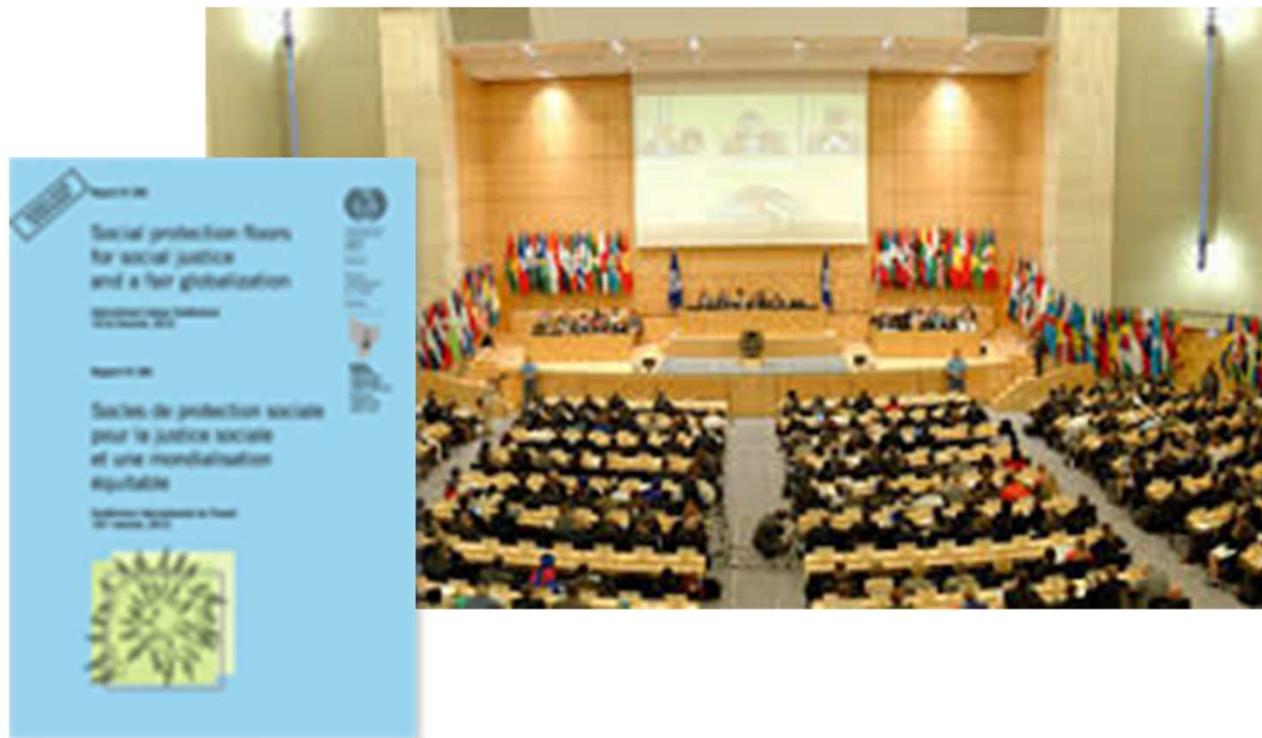
Jaminan Sosial adalah Hak Asasi Manusia

NAMUN...

73% penduduk dunia terus hidup tanpa cakupan perlindungan sosial yang memadai



2011 : Konferensi Perburuhan Internasional



Keputusan untuk mengawali prosedur adopsi sebuah standar internasional baru tentang landasan perlindungan sosial

Generasi Keempat

IV

202

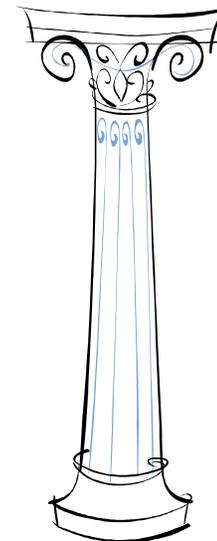
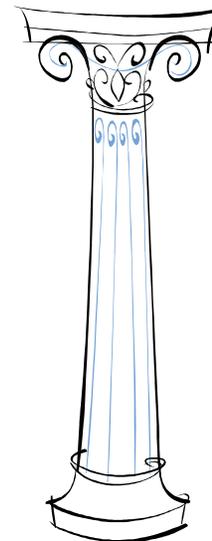
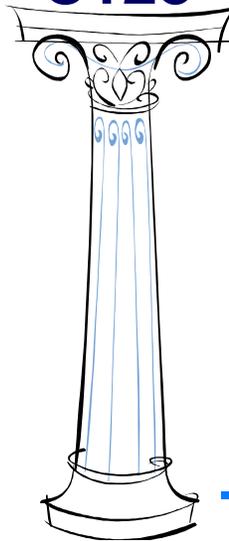
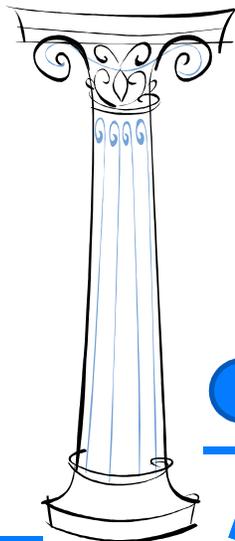
Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial

C121

C128

C130

C168



III

II

C118

C102

C19

C25

C36

C38

C40

C44

C12

C17

C18

C24

C35

C37

C39

C42

I

Tonggak sejarah sejak adopsi R202

- Juni 2012: Para pemimpin G20 berkomitmen untuk menetapkan landasan perlindungan sosial yang ditetapkan secara nasional
- Maret 2014: One-UN Social Protection Floors Country Teams

- Sept 2015: Adopsi SDGs
 - Sasaran 1.3 – Anti kemiskinan
 - Sasaran 3.8 – Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik
 - Sasaran 5.4 – Kesetaraan Gender
 - Sasaran 8.5 – Kerja Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
 - Sasaran 10.4 - Berkurangnya ketidaksetaraan



- Nov 2015: Prakarsa Perlindungan Sosial Universal (awalnya Bank Dunia dan ILO, kini lebih banyak mitra) – 21 Sep 2016 NY





**4. Standar jaminan sosial ILO:
*basis normatif strategi ILO untuk
perluasan jaminan sosial untuk semua***





Standar jaminan sosial utama ILO

Konvensi
Tunjangan
**Kecelakaan
Kerja**, 1964
(No. 121)



Konvensi
Tunjangan
**Disabilitas,
Hari Tua dan
Penyintas**,
1967 (No. 128)



Konvensi
Tunjangan
**Perawatan
Medis dan
Sakit**, 1969
(No. 130)



Konvensi Promosi
Kesempatan Kerja
dan Perlindungan
terhadap
Pengangguran,
1988 (No. 168)



Konvensi
**pemeliharaan
Hak Jaminan
Sosial**, 1982 (No.
157)

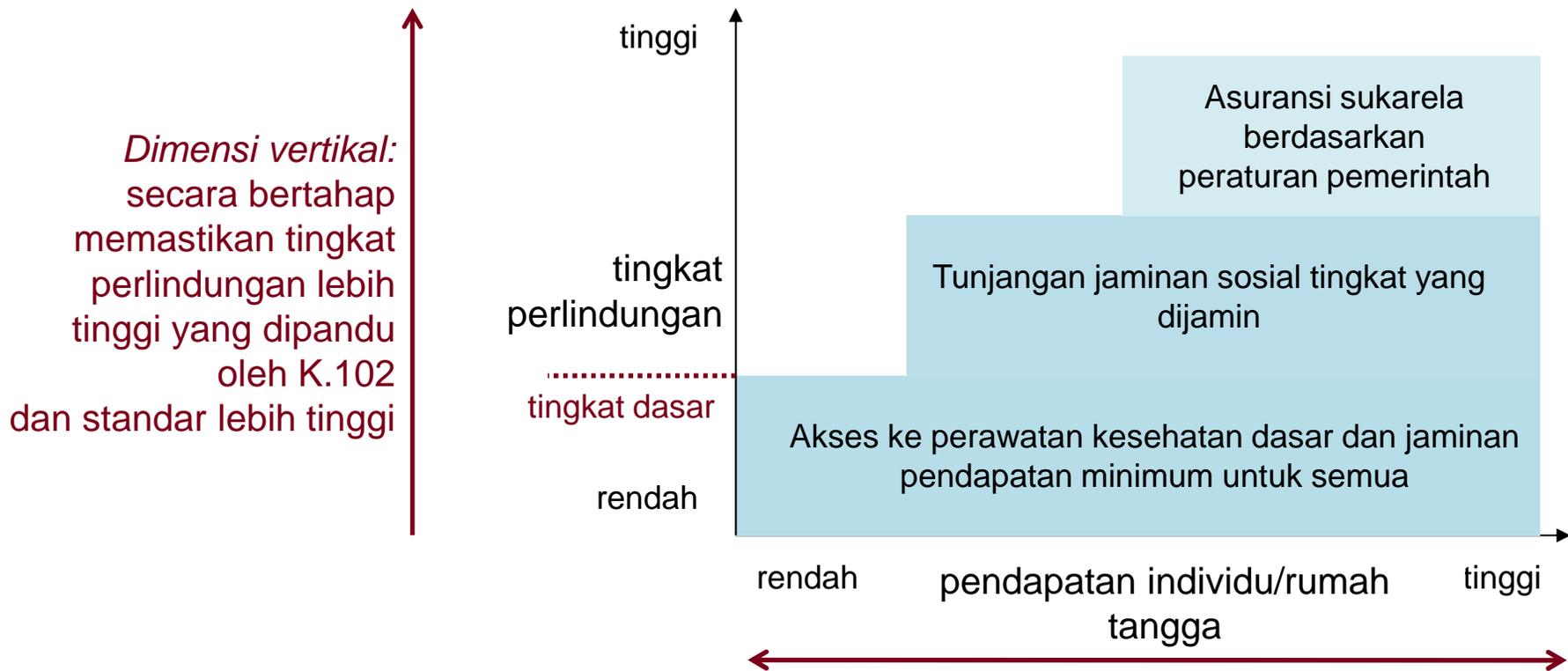


K.102 Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952

R202 Rekomendasi Landasan Jaminan Sosial, 2012



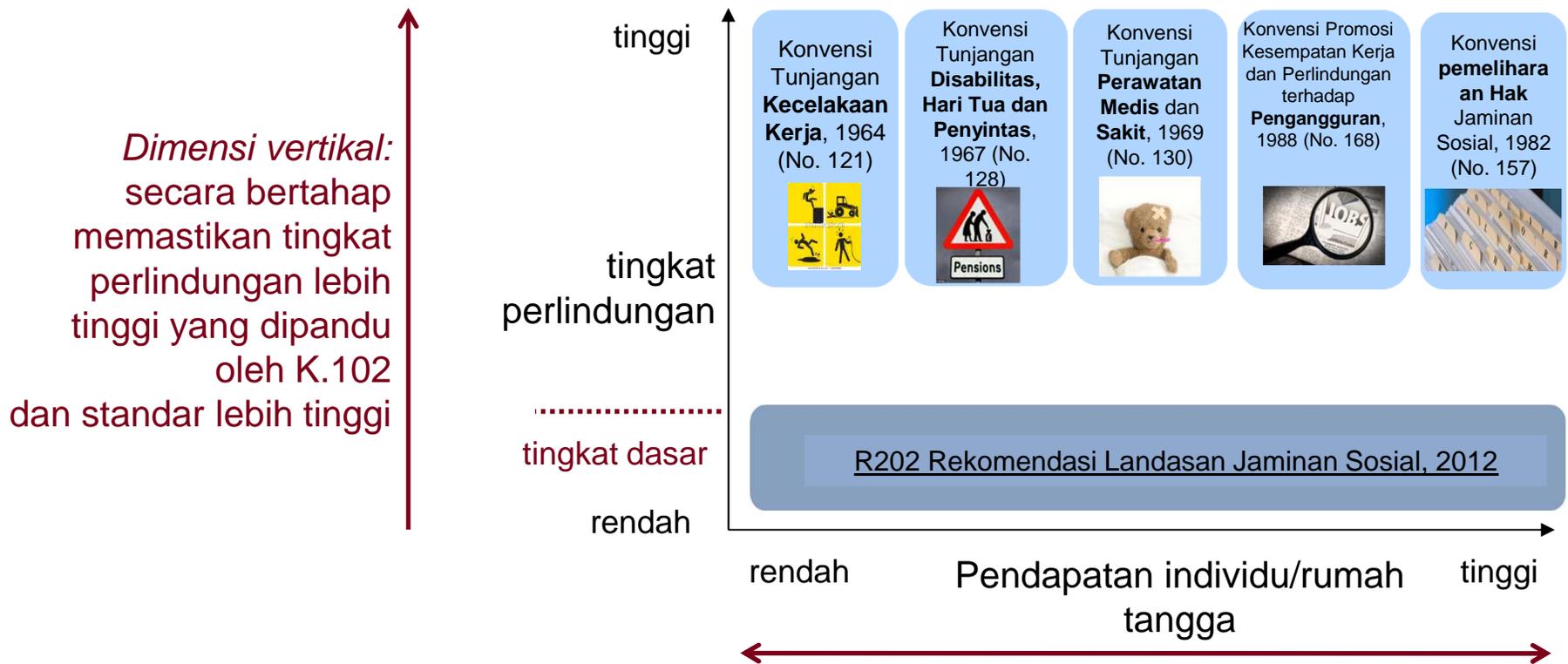
Strategi perluasan jaminan sosial nasional efektif: membangun sistem komprehensif (Basis normatif: Rekomendasi No. 202)



Dimensi horisontal:
Menjamin akses ke perawatan kesehatan dasar dan jaminan pendapatan minimum untuk semua yang dipandu oleh R.202



Strategi perluasan jaminan sosial nasional efektif: membangun sistem komprehensif (Basis normatif: Rekomendasi No. 202)



Dimensi horisontal:
Menjamin akses ke perawatan kesehatan dasar dan jaminan pendapatan minimum untuk semua yang dipandu oleh R.202



Dimensi horisontal LPS nasional: Sekurang-kurangnya empat jaminan yang ditentukan secara nasional

Landasan perlindungan sosial harus terdiri dari sekurang-kurangnya **garansi jaminan sosial dasar** berikut: (para. 5)



Akses ke serangkaian barang dan jasa yang membentuk perawatan kesehatan dasar termasuk perawatan maternitas



Jaminan pendapatan dasar untuk anak



Jaminan pendapatan dasar untuk orang dalam usia aktif yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup



Jaminan pendapatan dasar untuk lanjut usia

← penentuan tingkat minimum nasional →

Tunduk pada kewajiban internasional mereka yang ada, Anggota harus memberikan jaminan sosial dasar ini kepada sekurang-kurangnya semua penduduk dan anak-anak, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan nasional. (para. 6)





Siapa yang harus dicakup?

- Sekurang-kurangnya semua penduduk dan semua anak – di sepanjang siklus hidup, tunduk pada kewajiban internasional negara yang ada
- Terapkan prinsip universalitas perlindungan, sebagai tujuan, dengan prinsip realisasi bertahap untuk mencapainya





Universal social protection for human dignity, social justice and sustainable development

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE
JOBAS SECTORS, 2016

Dimensi vertikal: at perlindungan lebih tinggi





5 parameter inti...

MENGAPA ?
Perlindungan terhadap risiko apa?

SIAPA ?
Jumlah minimum orang yang dilindungi?

KAPAN ?
Syarat kualifikasi untuk mendapat tunjangan

BERAPA BANYAK ?
Tingkat tunjangan minimum

UNTUK BERAPA LAMA ?
Durasi minimum tunjangan



K.102 mencakup **multi klausul fleksibility** untuk memungkinkan sebanyak mungkin negara memenuhi ketentuannya dan **secara bertahap memperluas sistem mereka ke arah cakupan komprehensif**

- *Ratifikasi «à la carte»;*
 - *Syarat preferensi untuk negara berkembang;*
 - *Fleksibilitas yang memungkinkan sistem apapun untuk mematuhi.*





Pertanyaan: Apakah negara Anda merupakan negara pihak untuk Konvensi No.102?



Ratifikasi Konvensi No.102





RATIFICATION TOOLKIT

ILO social security conventions



Discover ILO standards & why ratifying them is important



Test your knowledge of Convention No. 102



How to ratify?



Status of ratification of ILO standards

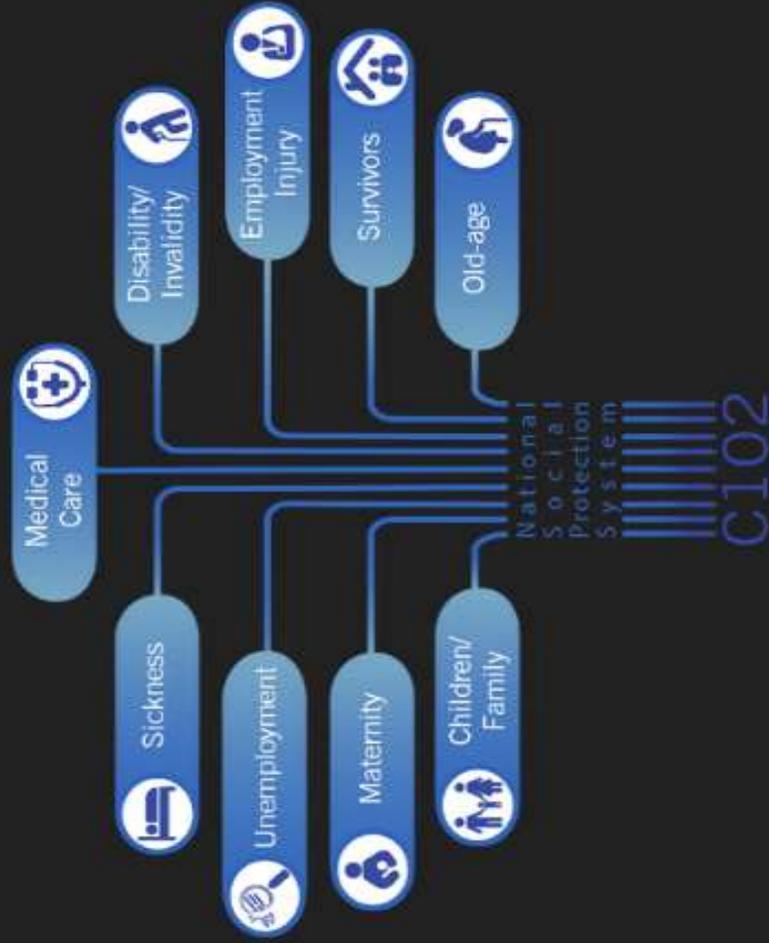


Explore other useful resources





Take the quiz on Convention No. 102





Bagaimana seharusnya sistem jaminan sosial nasional, termasuk LPS, diterapkan?



Strategi perluasan jaminan sosial nasional: Formulasi dan implementasi

- tetapkan tujuan yang mencerminkan prioritas nasional

dukung kelompok kurang beruntung dan orang berkebutuhan khusus

- identifikasi kesenjangan di, dan hambatan untuk, perlindungan

dukung pertumbuhan ketenagakerjaan formal dan pengurangan informalitas

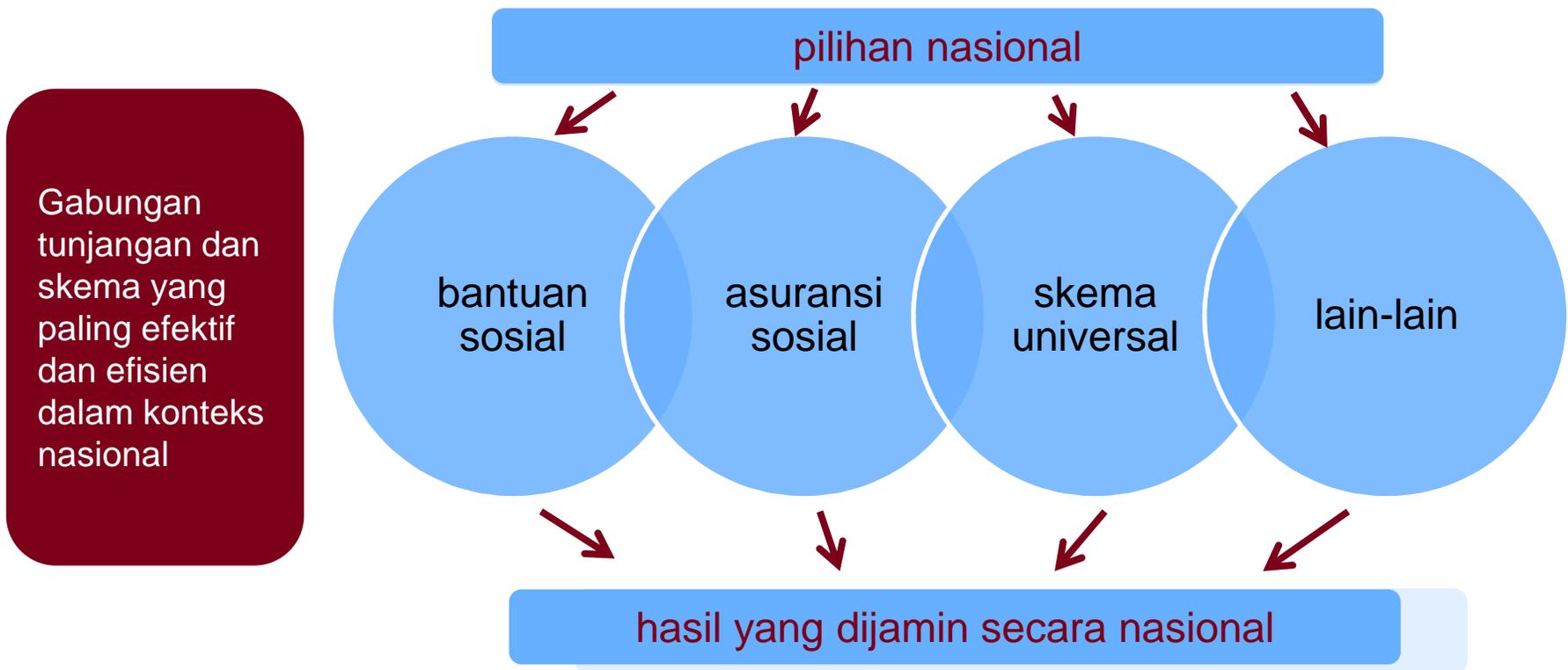
- upayakan menutup kesenjangan dalam perlindungan melalui skema yang tepat dan dikoordinasi secara efektif

Konsisten dengan dan kondusif pada implementasi rencana pembangunan sosial dan ekonomi nasional

- tentukan persyaratan finansial dan sumberdaya, kerangka waktu dan urutan untuk pencapaian tujuan secara bertahap



Pluralisme pendekatan...



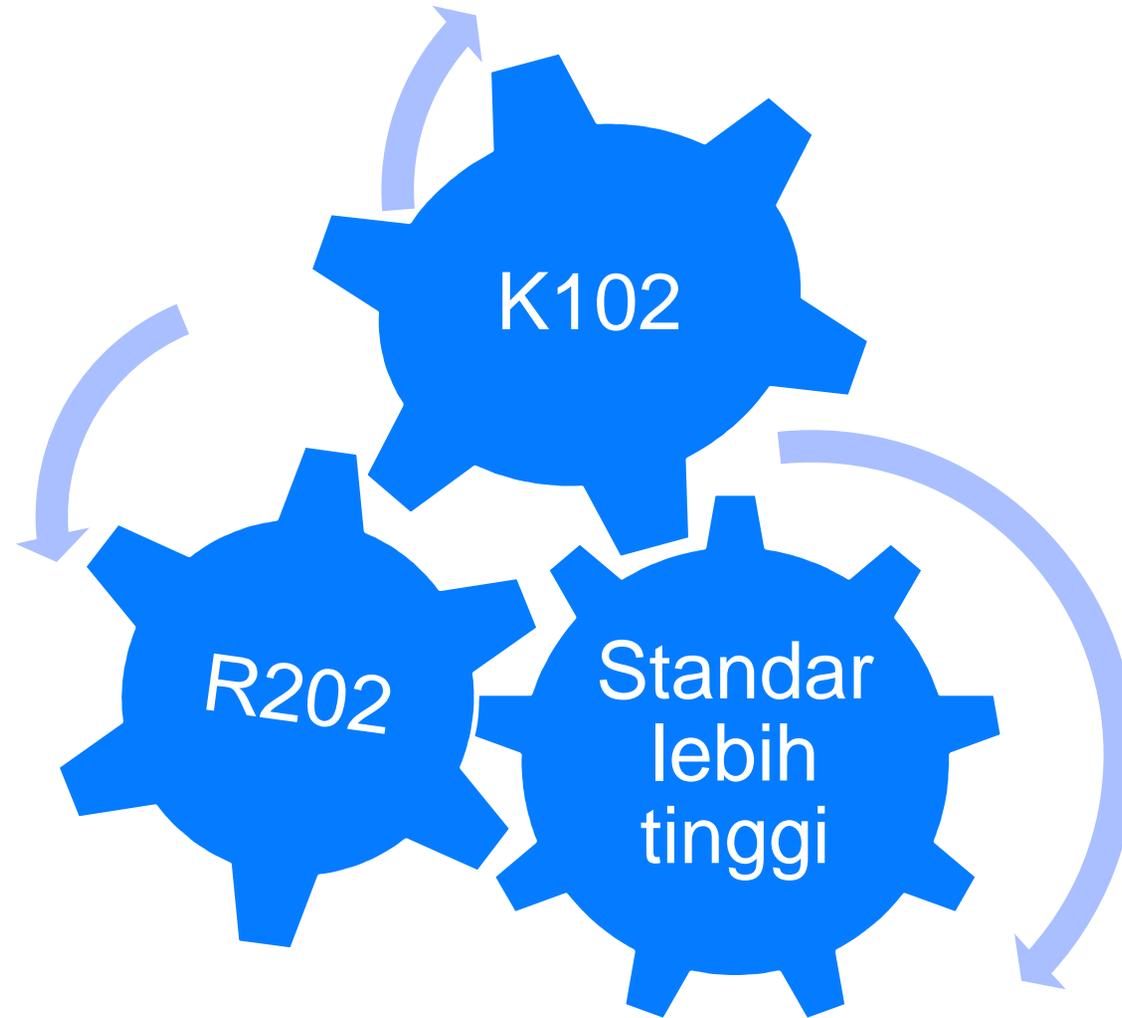
Gabungan tunjangan dan skema yang paling efektif dan efisien dalam konteks nasional

Hasil dapat dijamin melalui berbagai sarana
– termasuk tunjangan tunai dan non-tunai, transfer dan layanan –
tidak ada satu pendekatan untuk semua hal





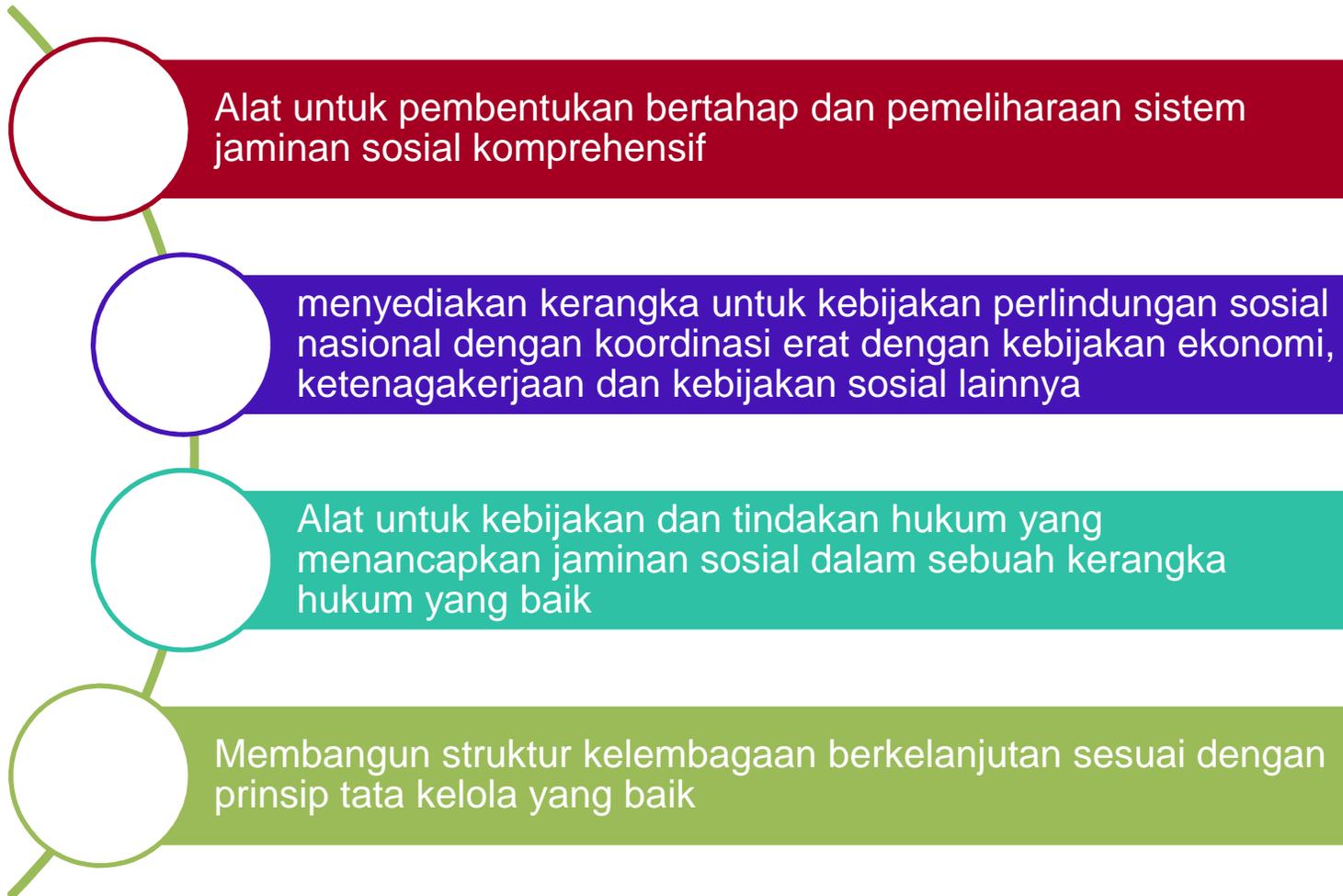
Sistem jaminan sosial komprehensif





5. Apa peran yang dapat dimainkan oleh standar jaminan sosial internasional?





Jalan menuju kerja layak, strategi untuk menurunkan angka kemiskinan dan sumbangsih pada realisasi SDG

mewujudkan hak asasi manusia pada jaminan sosial dengan memastikan bahwa kandungan intinya, minimal, tercapai, sehingga meningkatkan kepatuhan Negara terhadap kewajiban mereka berdasarkan konvensi dan perjanjian internasional dan regional lain

Stabilisator sosial dan ekonomi di masa krisis



TERIMA KASIH!

